



eISSN [3090-174X](#) & pISSN [3090-1367](#)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/42tnm339

Hal. 1156-1169

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Beranda Jurnal <https://indojournal.com/index.php/jisoh>

Politik Identitas dan Polarisasi Sosial: Dinamika dalam Demokrasi dengan Tinjauan Sistematis Literatur Review

Ananda Mazliana¹, Nazarlin², Suci Amanda Putri³, Rida Fijriah⁴, Ayerzi Oktal⁵
Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: anandamazliana03@gmail.com

Diterima: 03-04-2026 | Disetujui: 10-04-2026 | Diterbitkan: 12-04-2026

ABSTRACT

This study presents a Systematic Literature Review of 20 scholarly articles examining the relationship between identity politics and social polarization within democratic contexts. Identity politics is often utilized by political actors as a strategic tool to mobilize support based on shared affiliations such as religion, ethnicity, or culture. While it can enhance group representation, it frequently contributes to social fragmentation and conflict. The findings indicate that polarization is intensified by socio-economic inequalities and the role of social media algorithms, which create echo chambers and amplify provocative content. As a result, societies experience rising intolerance, delegitimization of political opponents, and declining trust in democratic institutions. The review also highlights that polarization extends beyond ideological differences into affective and cognitive dimensions, limiting constructive public discourse. Mitigation strategies identified in the literature include promoting tolerance-based education, strengthening media regulation, enhancing digital literacy, and reinforcing inclusive national values. Overall, this study underscores the dual nature of identity politics as both a tool for democratic participation and a potential threat to social cohesion when misused.

Keywords: *identity politics; social polarization; social media; democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian *Systematic Literature Review* terhadap 20 artikel ilmiah yang membahas hubungan antara politik identitas dan polarisasi sosial dalam konteks demokrasi. Politik identitas kerap digunakan oleh aktor politik sebagai strategi untuk menggalang dukungan berdasarkan kesamaan agama, etnis, atau budaya. Meskipun dapat memperkuat representasi kelompok, praktik ini sering kali memicu fragmentasi sosial dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi semakin diperkuat oleh ketimpangan sosial-ekonomi serta peran algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (*echo chambers*) dan mempercepat penyebaran konten provokatif. Dampaknya meliputi meningkatnya intoleransi, delegitimasi terhadap lawan politik, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Polarisasi juga tidak hanya terjadi pada tingkat ideologis, tetapi merambah ke dimensi afektif dan kognitif yang menghambat dialog publik yang konstruktif. Upaya penanggulangan yang diidentifikasi meliputi penguatan pendidikan toleransi, peningkatan literasi digital, regulasi media, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa politik identitas memiliki peran ganda sebagai sarana partisipasi demokratis sekaligus potensi ancaman bagi kohesi sosial apabila tidak dikelola secara bijak.

Kata kunci: politik identitas; polarisasi sosial; media sosial; demokrasi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mazliana, A., Nazarlin, N., Putri, S. A., Fijriah, R., & Oktal, A. (2026). Politik Identitas dan Polarisasi Sosial: Dinamika dalam Demokrasi dengan Tinjauan Sistematis Literatur Review. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1156-1169. <https://doi.org/10.63822/42tnm339>

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, politik identitas telah menjadi salah satu fenomena yang paling menonjol dalam lanskap demokrasi kontemporer, termasuk di Indonesia. Politik identitas, yang merujuk pada penggunaan afiliasi sosial seperti agama, etnis, atau ideologi sebagai alat mobilisasi politik, tidak hanya menguatkan keterwakilan kelompok tertentu, tetapi juga memicu polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Polarisasi ini tercermin dalam munculnya narasi "kami versus mereka", konflik horizontal, serta penurunan kualitas dialog publik dalam konteks elektoral dan non-elektoral (Mansyur, 2023; Sugianto et al., 2023).

Media sosial memperkuat dinamika ini, menjadi arena utama tempat identitas politik dikonstruksi, disebarkan, dan dipertentangkan. Generasi milenial dan Gen Z, sebagai kelompok digital native, menunjukkan bahwa keterikatan pada identitas politik tertentu yang diperkuat melalui media digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik digital. Namun, partisipasi ini tidak selalu bersifat deliberatif atau inklusif, karena seringkali disertai dengan bias konfirmasi, segregasi sosial, dan peningkatan sentimen afektif negatif terhadap kelompok lawan (Judijanto et al., 2024; Kholilurrohman, 2024).

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara lain seperti Amerika Serikat, Turki, dan Polandia, di mana polarisasi politik berbasis identitas menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas demokrasi. Penelitian Göksel (2024) menunjukkan bahwa di kedua negara tersebut, identitas politik bukan lagi sekadar afiliasi elektoral, melainkan telah membentuk batas-batas sosial yang kaku dan sulit dijembatani. Polarisasi bahkan merambah ke ranah masyarakat sipil seperti think tank, yang sebelumnya berfungsi sebagai ruang dialog lintas ideologi, tetapi kini lebih banyak memperkuat eksklusivitas (Sörbom & Jezierska, 2023).

Dalam konteks Indonesia, politik identitas kerap kali digunakan secara instrumental oleh elit politik menjelang pemilu untuk memperkuat basis dukungan. Penggunaan sentimen agama dan etnis dalam kampanye politik, meskipun dapat meningkatkan representasi kelompok tertentu, sering kali berdampak negatif terhadap integrasi nasional dan memperkuat stereotip sosial (Khoirunnisa, 2023; Rahmadhani et al., 2024). Polarisasi yang muncul bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan telah mengarah pada konflik sosial yang melemahkan fondasi demokrasi deliberatif.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas secara kritis dinamika politik identitas dan polarisasi sosial sebagaimana tercermin dalam berbagai studi terkini, baik dalam konteks lokal Indonesia maupun global. Dengan menelaah berbagai pendekatan teoretis dan temuan empiris, tulisan ini bertujuan memahami bagaimana politik identitas mempengaruhi lanskap demokrasi modern dan apa implikasinya bagi masa depan kebangsaan yang inklusif dan partisipatif.

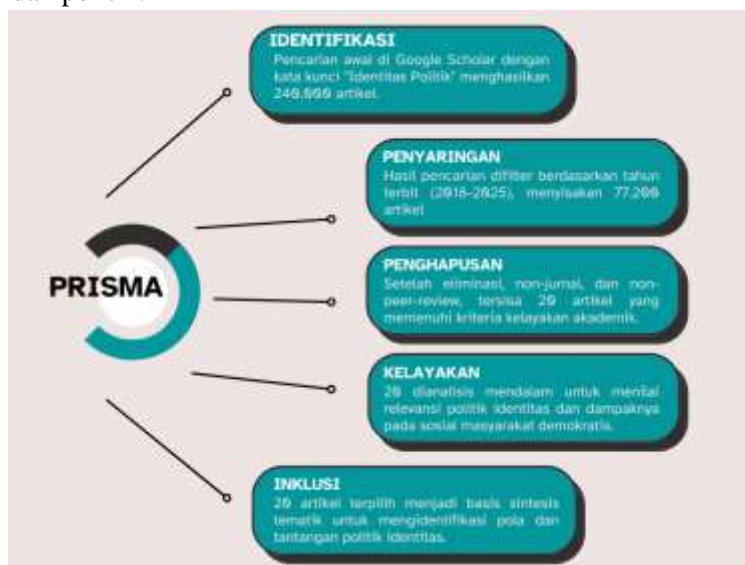
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai metode utama. Studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa artikel ilmiah, buku, maupun publikasi akademik lainnya, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu topik tertentu. Menurut (Dewi dalam Rusmawan, 2019:104). studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Sama halnya dengan

pengumpulan data dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber - sumber seperti buku, karya tulis, serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian Studi literature yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang terdahulu (M. Iqbal Hakim : 2013). Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian

Tinjauan literatur dilakukan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) sebagai panduan dalam menyeleksi dan menyaring artikel yang dijadikan bahan analisis. Pendekatan PRISMA digunakan untuk memastikan proses penelusuran dan pemilihan sumber dilakukan secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Langkah pertama dilakukan melalui proses identifikasi artikel menggunakan mesin pencari akademik Google Scholar, dengan kata kunci "Identitas Politik". Penelusuran awal menghasilkan kurang lebih 240.000 artikel. Untuk memastikan relevansi dan keterkinian data, dilakukan membalik rentang tahun terbit artikel menjadi 2018 hingga 2025, sehingga jumlah artikel menyempit menjadi sekitar 77.200.

Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan abstrak dan keseragaman topik. Artikel yang tidak berkaitan langsung dengan isu politik identitas dan demokrasi serta yang tidak berasal dari jurnal bereputasi atau tidak melalui proses peer-review, dieliminasi. Dari proses ini, dilakukan tahap penilaian kelayakan dengan membaca secara penuh artikel-artikel terpilih untuk memastikan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Tahap akhir adalah inklusi, yaitu menentukan artikel-artikel mana yang paling relevan dan layak untuk dijelaskan. Hasil akhirnya, sebanyak 20 artikel ilmiah terpilih sebagai sumber utama dalam penulisan ini. Data yang diperoleh dijelaskan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, hasil temuan, serta tantangan empiris yang muncul dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana identitas politik membentuk atau mempengaruhi kohesi sosial dalam masyarakat demokratis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus akademik di bidang ilmu sosial dan politik.



Gambar 1. PRISMA Diagram Flowchart

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena politik identitas dalam demokrasi kontemporer tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai alat mobilisasi dan artikulasi kekuasaan. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dua puluh artikel akademik, terlihat bahwa politik identitas bukan lagi sekadar manifestasi dari perbedaan kultural atau agama, tetapi telah menjadi strategi politik yang sengaja dibentuk dan dipertajam oleh elite untuk kepentingan elektoral. Temuan ini sejalan dengan argumen Ibnu Mansyur (2023) yang menekankan bahwa polarisasi di Indonesia antara tahun 2014–2019 tidak bersumber dari perbedaan ideologis murni, melainkan dari konstruksi elite politik yang mengeksploitasi identitas sebagai alat mobilisasi. Konsep ini senada dengan teori *instrumentalist* dalam politik identitas, di mana identitas digunakan secara strategis, bukan semata-mata ekspresi jati diri kolektif.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Khoirunnisa (2023), yang menjelaskan bahwa agama dan nasionalisme seringkali dipertentangkan dalam ruang politik. Padahal, dua identitas ini bisa saja berjalan beriringan jika ada ruang dialog dan saling pengertian. Sayangnya, dalam praktik politik yang pragmatis, identitas sering dimanfaatkan sebagai alat kampanye dan propaganda, bukan sebagai pondasi persatuan.

Tak hanya di Indonesia, fenomena serupa juga terjadi di negara lain. Sörbom dan Jezierska (2023) menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil di Polandia, seperti think tank, kini hanya menjalin kerja sama dengan pihak yang sehaluan secara politik. Artinya, hubungan sosial yang seharusnya menjadi jembatan justru memperkuat tembok perbedaan. Inilah yang disebut mereka sebagai “modal sosial yang terpolarisasi”, kepercayaan dan kerja sama hanya tumbuh di dalam kelompok sendiri, bukan lintas perbedaan.

Temuan penting lainnya datang dari dunia digital. Beberapa penelitian seperti dari Assidiq et al. (2023) dan Judijanto et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat identitas politik, terutama di kalangan anak muda. Di satu sisi, ini bisa menjadi alat positif untuk mengekspresikan pendapat dan meningkatkan partisipasi politik. Tapi di sisi lain, media sosial juga mempermudah penyebaran informasi yang menyesatkan dan memperkuat kelompok-kelompok tertutup yang hanya mendengarkan suara sendiri (*echo chambers*). Akibatnya, diskusi yang sehat makin sulit ditemukan.

Fenomena ini bahkan menjadi lebih kompleks ketika menyangkut isu moral dan keagamaan. Seperti dijelaskan oleh Cely (2025), masyarakat Eropa yang religius dan sekuler kini makin sulit menemukan titik temu dalam membahas isu-isu sensitif seperti aborsi atau pernikahan sesama jenis. Bukan karena perbedaan argumen, tapi karena masing-masing melihat nilai mereka sebagai “kebenaran absolut”. Ketegangan ini kemudian dimanfaatkan oleh partai politik dan media untuk menarik dukungan dengan cara yang emosional, bukan rasional. Selain itu, Turner-Zwinkels dan timnya (2023) menambahkan bahwa polarisasi bukan hanya terjadi karena isi keyakinan politik, tapi juga karena struktur berpikir yang makin berbeda. Semakin seseorang merasa identitas politiknya terancam, semakin besar jaraknya dengan kelompok lain, bahkan ketika isi kepercayaannya sebenarnya mirip.

Dalam skala lokal, politik identitas juga terbukti berdampak besar. Penelitian di tingkat desa oleh Surya et al. (2021) menunjukkan bahwa politik etnis bisa digunakan untuk memenangkan jabatan kepala desa, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan sosial yang berbahaya. Hal ini menguatkan bahwa politik identitas tidak hanya terjadi dalam politik nasional, tetapi juga menjalar sampai ke akar rumput. Namun demikian, tidak semua politik identitas berdampak negatif. Soenjoto (2019) justru melihat bahwa generasi milenial di Indonesia punya potensi untuk menggunakan identitasnya secara positif, sebagai alat

memperjuangkan keberagaman dan keadilan sosial. Dengan komunikasi yang terbuka dan kesadaran multikultural, politik identitas bisa menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah.

Secara keseluruhan, kajian ini memperlihatkan bahwa politik identitas adalah bagian yang tak terhindarkan dalam demokrasi saat ini. Ia bisa menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi kelompok, tapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Ketika identitas digunakan hanya untuk memenangkan kekuasaan, demokrasi tidak lagi sebagai ruang diskusi dan kerja sama. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat literasi politik, ruang dialog antar kelompok, serta regulasi media yang adil agar identitas tidak lagi menjadi alat perpecahan, tapi menjadi dasar untuk membangun demokrasi yang sehat dan inklusif.

Tabel 1. List of articles used in reviews

No	Author (Year)	Journal	Setting	Place	Method
1	Assidiq et al. (2023)	<i>Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)</i> , Vol. 3(9)	Peran media sosial dalam identitas nasional	Indonesia (multi-kota)	Kualitatif – Survei & wawancara
2	Ibnu C. Mansyur (2023)	<i>Jurnal Politik Profetik</i> , Vol. 11(1), 1–22	Kajian pustaka tentang polarisasi politik	Indonesia	Kualitatif – Studi literatur
3	Khoirunnisa (2023)	<i>Jurnal Polinter</i> , Vol. 9(1), Maret–Agustus 2023	Analisis politik identitas pada pemilu	Indonesia	Yuridis normatif – Studi pustaka
4	Sörbom & Jezierska (2023)	<i>Journal of Civil Society</i> , Vol. 19(4), 347–365	Studi hubungan antar organisasi sipil	Polandia	Kualitatif – Wawancara
5	Skoog & Karlsson (2022)	<i>Political Research Exchange</i> , Vol. 4(1)	Survei terhadap politisi lokal	Swedia	Survei kuantitatif
6	Loso Judijanto et al. (2024)	<i>Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora</i> Vol. 2 No. 01	Pengaruh politik identitas dan media sosial pada generasi muda	Indonesia	Kuantitatif, SEM-PLS pada 200 responden

7	Moch. Awin Firmansyah et al. (2024)		● Lega cy: Jurnal Hukum dan Perundang- undangan Vol. 4 No. 1	Politik identitas menjelang Pemilu 2024	Indonesia	Kualitatif, studi literatur dan analisis kontekstual
8	Sugianto, Visman, Darwin (2023)			Polarisasi akibat politik identitas dalam Pemilu 2024	Indonesia (Bau-Bau, Buton)	Kualitatif, analisis data sekunder (literatur, berita)
9	Tadeas Cely (2025)	European Politics	Union	Polarisasi opini publik atas isu moral di Eropa	19 negara Eropa	Kuantitatif, analisis data European Values Study (1990–2017)
10	Oğuzhan Göksel (2024)	UPA Strategic Affairs Vol. 5 No. 2		Perbandingan kutub politik di Turki dan AS	Türkiye & United States	Studi komparatif, literatur akademik dan analisis konseptual
11	Rahmadhani et al. (2024)	<i>IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research</i> , Vol. 3(1)		Deskriptif mengenai pemilu	Indonesia	Deskriptif kualitatif (analisis isi dan naratif)
12	Marlef et al. (2024)	<i>IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research</i> , Vol. 3(1)		Studi kepuustakaan dan analisis politik	Indonesia	Metode kualitatif
13	Kim & Zhou (2020)	<i>International Journal of Communication</i> , Vol. 14		Eksperimen framing berita politik	Korea Selatan & AS	Eksperimen antara-subjek (randomized)
14	Peffley et al. (2024)	<i>Political Research Quarterly</i> , Vol. 77(1)		Survei panel eksperimental dua gelombang	Israel	Observasional & eksperimen survei
15	Schweighofer (2018)	ETH Dissertation	Zurich	Studi multidisipliner (psikologi- politik)	Swiss Parliament, media sosial global	Mixed methods: kuantitatif, NLP, agent- based modeling
16	Wening Purbatin Palupi Soenjoto (2019)	Journal of Islamic Studies and Humanities		Eksplorasi politik identitas pada generasi milenial era 4.0	Indonesia (Jawa Timur: Mojokerto, Jombang, Ponorogo)	Kualitatif: deskriptif, survei, wawancara (150 mahasiswa)

17	Dian Ariyani Surya et al. (2021)	<i>INDEPENDEN</i> Vol. 2 No. 2	Politik identitas dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa Rumpin, Indonesia	Kualitatif: deskriptif, wawancara, studi literatur
18	Dinar Astuti et al. (2023)	<i>SIBATIK Journal</i> Vol. 2 No. 6	Politik identitas dalam kontroversi isu di Indonesia	Indonesia	Kualitatif: observasi, studi pustaka, media sosial
19	Turner-Zwinkels et al. (2023)	<i>Personality and Social Psychology Bulletin</i>	Affective polarization dan sistem kepercayaan politik	Multinasional (Eropa dan global)	Kuantitatif: dua studi survei cross-sectional (N=4.152 & 29.994)
20	Roderik Rekker (2021)	<i>Public Understanding of Science</i>	Polarisasi politik terhadap sains	Global (fokus pada AS dan negara maju)	Review teoretis, kerangka interdisipliner

*STEM (Science, Technology, engineering, and Mathematics)

**N/A (Not Mentioned)

***KSA (Kingdom of Saudi Arabia)

Tabel 2. Element isu-isu Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja

Author (Year)	Keyword	Motivational outcomes and Learning Result
Assidiq et al. (2023)	Media sosial, generasi milenial, identitas nasional	Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk identitas nasional generasi milenial. Media bisa memperkuat nilai kebangsaan jika digunakan bijak, tetapi juga berpotensi memperkuat polarisasi. Pembelajaran utamanya adalah pentingnya literasi digital untuk menjaga identitas bangsa.
Ibnu C. Mansyur (2023)	Polarisasi politik, elite politik, masyarakat sipil	Artikel ini memotivasi pentingnya mengkaji hubungan antara polarisasi elite dan polarisasi di tingkat masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa polarisasi elite dapat menular ke masyarakat jika tidak diimbangi oleh penguatan kesadaran kritis dan literasi politik. Pembelajaran pentingnya adalah menjaga kewarasan publik melalui media dan pendidikan politik.
Khoirunnisa (2023)	Politik identitas, keagamaan, nasionalisme, pemilu	Kajian ini memotivasi perlunya memahami dualitas identitas agama dan nasionalisme dalam pemilu di Indonesia. Ditemukan bahwa meskipun politik identitas bisa memicu konflik, ia juga dapat menjadi fondasi identitas nasional. Pelajaran pentingnya adalah membangun dialog antar identitas demi menjaga stabilitas politik.

Sörbom & Jezierska (2023)	Social capital, polarization, think tanks, civil society	Artikel ini memotivasi kesadaran bahwa organisasi masyarakat sipil seperti think tank dapat memperkuat atau memperparah polarisasi tergantung bagaimana mereka membangun relasi sosial. Pembelajaran pentingnya adalah bahwa jaringan sosial bisa menyatukan, tapi juga bisa mempertegas jurang perbedaan bila tidak dikelola secara inklusif.
Skoog & Karlsson (2022)	Political polarization, perception, trust, partisanship	Studi ini memotivasi pemahaman bahwa persepsi terhadap polarisasi berbeda tergantung pada apakah politisi berada di pihak pemenang atau oposisi. Peneliti menemukan bahwa politisi yang merasa menjadi "pemenang" cenderung melihat suasana lebih damai. Ini memberikan pelajaran bahwa posisi politik dapat membentuk cara pandang terhadap lawan.
Loso Judijanto et al. (2024)	Digital Participation, Generation Z, Identity Politics, Social Media	Menjelaskan bagaimana media sosial memperkuat efek politik identitas terhadap partisipasi politik digital generasi muda. Memberikan wawasan untuk meningkatkan literasi digital dan keterlibatan politik yang sehat.
Moch. Awin Firmansyah et al. (2024)	Identity politics, Election, Democracy	Memberikan pemahaman tentang bahaya politik identitas terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi. Mendorong pemilih untuk fokus pada substansi kebijakan dan kualitas calon.
Sugianto, Visman, Darwin (2023)	Identity Politics, Polarization, Elections	Menunjukkan bahwa penggunaan identitas agama dan etnis oleh elite politik mengganggu budaya demokrasi. Menekankan pentingnya pendidikan politik untuk membentuk pemilih rasional.
Tadeas Cely (2025)	Public opinion polarization, Culture wars, Comparative politics, Europe	Mengungkap pengaruh budaya religius terhadap polarisasi opini moral. Hasil menunjukkan bahwa warisan konflik gereja-negara di negara Katolik memperkuat perpecahan opini.
Oğuzhan Göksel (2024)	Political Polarization, Populism, Democratic Erosion, Türkiye, United States	Memberikan pemahaman perbandingan antara AS dan Türkiye tentang dampak kutub politik. Menunjukkan perlunya koalisi lintas ideologi dan kebijakan inklusif sebagai solusi mengurangi polarisasi.
Simon Schweighofer (2018)	Political polarization, affect, social identity, cognition	Penelitian ini menunjukkan bahwa afek dan identitas sosial dapat memperkuat polarisasi politik melalui mekanisme psikologis yang mempersempit cara berpikir dan memperkuat loyalitas kelompok. Pembelajaran utamanya adalah bahwa diskusi politik daring yang emosional dapat memicu argumentasi dangkal dan memperkuat polarisasi.
Peffley, Yair, & Hutchison (2024)	Political tolerance, social identity, ideological polarization	Studi ini mengajarkan bahwa kekuatan identitas politik dapat berdampak berbeda tergantung ideologi: semakin kuat identitas kanan, semakin

			intoleran; sementara pada kelompok kiri, justru meningkatkan toleransi. Ini memberi wawasan bahwa identitas bisa jadi pelindung nilai demokrasi bila diarahkan secara konstruktif.
Youngju Kim & Shuhua Zhou (2020)	Political conflict, news framing, identity salience		Dalam penelitian Eksperimen ini mengajarkan bahwa framing berita konflik politik secara langsung meningkatkan saliens identitas partai dan mendorong polarisasi sikap. Peneliti belajar bahwa media bukan sekadar penyampai info, tapi juga pemicu polarisasi melalui cara menyajikan konflik antarkelompok politik.
Atika Marlef et al. (2024)	Political polarization, social psychology, democracy		Studi literatur ini menyoroti bahwa polarisasi politik Indonesia dipicu oleh perbedaan antara kelompok Islamis dan pluralis. Penulis mempelajari bahwa media dan framing partai memperparah fragmentasi sosial. Hal ini memotivasi pentingnya menjaga ruang publik dari provokasi berbasis identitas.
Alfi Rahmadhani et al. (2024)	Identity politics, elections, ethnicity, religion		Penelitian ini menekankan bahwa politik identitas menjadi tantangan serius bagi demokrasi, karena dapat memperdalam perpecahan sosial. Pembelajaran pentingnya adalah perlunya membangun politik yang inklusif dan dialogis agar perbedaan tidak dijadikan alat konflik, tetapi dikelola untuk persatuan nasional.
Wening Purbatin Palupi Soenjoto (2019)	Identity Politics, Millennial Generation, Era 4.0, Social Media		Menunjukkan kerentanan generasi milenial terhadap eksploitasi identitas melalui media sosial. Memberikan pembelajaran bahwa pendidikan politik dan literasi digital sangat penting untuk mencegah intoleransi dan manipulasi politik.
Dian Ariyani Surya et al. (2021)	Village Head Election, Identity Politics, Ethnic Politics		Menunjukkan bagaimana politik identitas di tingkat lokal dapat menimbulkan nepotisme dan konflik horizontal. Memberikan pembelajaran bahwa identitas primordial sering digunakan secara pragmatis untuk meraih kekuasaan.
Dinar Astuti et al. (2023)	Identity Politics, Controversy, Social Conflict		Memberi pemahaman pentingnya keseimbangan antara pengakuan identitas dan persatuan. Mengajak pembaca untuk mewaspadaai potensi polarisasi akibat politik identitas yang berlebihan.
Turner-Zwinkels et al. (2023)	Affective Polarization, Political Identity, Belief System		Menyediakan bukti empiris tentang hubungan antara struktur dan isi sistem kepercayaan politik dengan polarisasi afektif. Mengajarkan bahwa kesamaan struktur berpikir bisa mengurangi atau meningkatkan ketegangan politik tergantung konteksnya.
Roderik Rekker (2021)	Political Polarization, Science Rejection, Ideology, Partisanship		Menguraikan bagaimana penolakan terhadap sains bisa timbul dari identitas politik. Menawarkan kerangka interdisipliner untuk memahami polarisasi berbasis sains. Mendorong

pentingnya literasi ilmiah dan kepercayaan publik terhadap sains.

Definisi Politik Identitas dan Polarisasi

Politik identitas merujuk pada strategi politik yang menggunakan ciri-ciri sosial seperti agama, etnisitas, budaya, dan kelompok ideologis untuk membentuk solidaritas politik dan memperkuat dukungan massa (Astuti et al., 2023; Soenjoto, 2019). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan kelompok tertentu agar suaranya didengar dan diakui dalam arena politik yang lebih luas. Identitas kelompok menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan masyarakat merasa representatif secara langsung, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk dan multikultural. Namun, praktik politik identitas tidak hanya terbatas pada penguatan solidaritas, melainkan juga dapat memicu persaingan dan konflik antar kelompok (Surya et al., 2021).

Polarisasi adalah konsekuensi yang kerap mengikuti politik identitas, yakni pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan dan cenderung menimbulkan permusuhan (Marlaf et al., 2024; Peffley et al., 2024). Polarisasi ini tidak hanya terlihat pada perbedaan ideologis, tetapi juga dalam dimensi afektif, di mana individu atau kelompok menunjukkan emosi negatif dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Dalam konteks media sosial, polarisasi semakin tajam karena interaksi yang cenderung berputar dalam lingkaran kelompok sendiri (Kim & Zhou, 2020; Schweighofer, 2018). Hal ini menciptakan jurang sosial yang dalam dan menghambat dialog konstruktif antar kelompok.

Faktor yang Mempengaruhi

1) Peran Tokoh Politik

Tokoh politik sangat berpengaruh dalam membuat masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama, atau latar belakang lainnya. Dalam kampanye politik, mereka sering menggunakan kata-kata yang membangkitkan rasa bangga terhadap kelompok sendiri dan rasa curiga terhadap kelompok lain. Hal ini mereka lakukan supaya orang-orang lebih mudah diajak memilih berdasarkan kesamaan identitas, bukan berdasarkan program kerja. Marlaf et al. (2024) menyatakan bahwa tokoh politik memakai cara ini untuk menarik simpati dengan mengangkat isu-isu yang menyentuh sisi emosional masyarakat.

Akibat dari cara ini adalah munculnya perasaan tidak suka dan saling curiga di antara kelompok yang berbeda. Astuti et al. (2023) menjelaskan bahwa masyarakat menjadi lebih sering bertengkar karena perbedaan pilihan politik yang dasarnya adalah perbedaan agama atau etnis, bukan isi gagasan. Tokoh politik yang menggunakan strategi ini juga membuat diskusi publik menjadi tidak sehat, karena orang-orang cenderung fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat lain.

2) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Perbedaan kondisi hidup antara kelompok masyarakat kaya dan miskin sering kali membuat kelompok yang merasa tertinggal mencari perlindungan dalam kelompok identitasnya, seperti agama atau etnis. Dalam situasi ini, mereka merasa lebih aman dan punya tempat untuk bersuara. Surya et al. (2021) menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah akan lebih mudah bersatu dengan kelompok yang punya latar belakang sama untuk menuntut keadilan.

Masalahnya, perasaan tertinggal ini bisa menjadi bahan bakar bagi konflik jika ada yang memprovokasi. Kadang, kelompok tertentu dituduh sebagai penyebab dari ketimpangan yang terjadi. Dalam jangka panjang, hal ini membuat orang semakin mudah menyalahkan kelompok lain atas kesulitan yang mereka alami. Perasaan tidak adil ini semakin memperkuat pembagian masyarakat menjadi "kami" dan "mereka".

3) Pengaruh Media Sosial dan Sistem Algoritma

Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok punya sistem yang hanya menampilkan postingan yang mirip dengan apa yang kita sukai. Akibatnya, orang-orang hanya melihat pendapat yang sejalan dengan pikirannya sendiri dan jarang melihat sudut pandang lain. Törnberg (2018) menunjukkan bahwa hal ini membuat orang semakin yakin bahwa pandangannya yang paling benar dan pandangan lain dianggap salah atau bahkan berbahaya.

Selain itu, media sosial cenderung lebih sering menampilkan konten yang menimbulkan emosi marah atau benci, karena konten seperti ini membuat orang lebih aktif berkomentar atau membagikannya. Kim & Zhou (2020) menjelaskan bahwa sistem ini membuat masyarakat makin mudah terpecah karena terus-menerus melihat konten yang menekankan perbedaan dan pertentangan. Akibatnya, orang menjadi sulit berdiskusi secara tenang dan terbuka.

Dampak

Di sisi lain, dampak negatif politik identitas tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya polarisasi sosial yang menyebabkan fragmentasi masyarakat (Marlaf et al., 2024; Peffley et al., 2024). Polarisasi tersebut dapat merusak kohesi sosial dan menimbulkan konflik horizontal yang berpotensi memicu kekerasan antar kelompok. Ketegangan yang terjadi lebih sering bersifat emosional dan afektif, yang memperkuat permusuhan dan mengurangi kemungkinan kompromi politik (Turner-Zwinkels et al., 2025).

Media sosial juga memperburuk dampak ini dengan mempercepat penyebaran narasi yang memecah belah dan memperkuat sikap intoleransi serta delegitimasi terhadap lawan politik (Kim & Zhou, 2020; Schweighofer, 2018). Dampak lebih luas lainnya adalah menurunnya kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan ilmu pengetahuan, karena polarisasi yang dalam membuat masyarakat terjebak dalam sikap penolakan terhadap informasi yang dianggap bertentangan dengan identitas kelompoknya (Rekker, 2021). Oleh karena itu, polarisasi yang disebabkan oleh politik identitas menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Upaya Penanggulangan dan Pencegahan

Untuk mengatasi politik identitas dan polarisasi, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan, regulasi media, dan penguatan nilai kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan berpikir kritis harus ditanamkan sejak dini, agar individu tidak mudah terjebak dalam narasi identitas eksklusif (Soenjoto, 2019). Dalam konteks media sosial, perlu ada kebijakan dan regulasi yang mampu menekan penyebaran konten provokatif dan polarisatif, serta mendorong platform digital untuk mempromosikan informasi yang inklusif dan berbasis fakta (Marlaf et al., 2024). Di tingkat sosial-politik, penting untuk membangun dialog antar kelompok dengan pendekatan multikulturalisme dan inklusivitas, sehingga identitas tidak menjadi alat pemecah melainkan jembatan untuk memperkuat kohesi

sosial (Astuti et al., 2023). Hanya dengan kombinasi strategi ini, demokrasi Indonesia dapat terhindar dari ancaman perpecahan akibat politik identitas dan polarisasi yang tak terkendali.

Implikasi Terhadap Demokrasi

Polarisasi politik yang berbasis identitas mengancam fondasi demokrasi yang sehat, yang semestinya dibangun atas dasar toleransi, rasionalitas, dan kerja sama. Polarisasi menyebabkan delegitimasi terhadap lawan politik, merusak ruang publik yang inklusif, serta memicu konflik horizontal yang sulit diredam (Rahmadhani et al., 2024; Astuti et al., 2023).

KESIMPULAN

Politik identitas telah menjadi fenomena dominan dalam demokrasi kontemporer, berperan ganda sebagai alat representasi sekaligus sebagai sumber konflik sosial. Temuan dari 20 artikel ilmiah menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi solidaritas kelompok berdasarkan agama, etnis, atau budaya, tetapi juga digunakan secara instrumental oleh elite politik untuk kepentingan elektoral. Praktik ini telah memperkuat polarisasi sosial, yang ditandai oleh meningkatnya konflik horizontal, afek negatif terhadap kelompok lain, dan delegitimasi terhadap lawan politik.

Media sosial dan algoritmanya mempercepat dan memperdalam proses polarisasi ini melalui efek ruang gema (*echo chambers*) dan penyebaran konten provokatif. Ketimpangan sosial-ekonomi, retorika politik yang memecah belah, dan minimnya literasi politik memperparah fragmentasi sosial dalam masyarakat demokratis, termasuk di Indonesia. Polarisasi ini bukan hanya terjadi pada tataran ideologis, tetapi juga pada dimensi afektif dan kognitif, sehingga mempersempit ruang diskusi dan kerja sama lintas identitas.

Meski demikian, politik identitas tidak sepenuhnya destruktif. Dalam konteks yang inklusif dan dialogis, ia dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang memperkuat keadilan sosial dan partisipasi demokratis, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, tantangan utama bukan pada keberadaan politik identitas itu sendiri, melainkan pada bagaimana ia digunakan dan dikendalikan.

Untuk meredakan dampak negatif politik identitas dan polarisasi, diperlukan upaya kolaboratif yang mencakup: (1) pendidikan kewarganegaraan berbasis toleransi dan berpikir kritis, (2) regulasi media sosial untuk menekan konten polarisatif, serta (3) penguatan nilai-nilai kebangsaan dan ruang dialog antar kelompok. Pendekatan multidimensi ini penting agar demokrasi tidak menjadi korban dari manipulasi identitas, tetapi justru tumbuh sebagai ruang yang sehat untuk perbedaan, inklusi, dan kohesi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiq, W. F. R., Alfarhani, M. D. U., Nandhika, D., & Amirullah, M. F. (2023). Analisis peran media sosial dalam membentuk identitas nasional generasi milenial di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(9), 772-775.
- Astuti, D., Agustang, A., & Idrus, II (2023). Politik identitas dalam kontroversi isu di Indonesia. *Jurnal SIBATIK*, 2(6), 1769-1773.
- Cely, T. (2025). New threat of culture wars? The religious roots of public opinion polarization on morality issues in Europe. *European Union Politics*, 14651165251320882.

- Göksel, O. (2024). *Two Nations, One Divide: Examining the Roots of Political Polarization in Türkiye and the United States*. UPA Strategic Affairs, 5(2), 22-70.
- Judijanto, L., et al. (2024). *Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital*. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 24–35.
- Khoirunnisa, K. (2023). *Pemilu dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan dan Keagamaan*. *Jurnal Polinter*, 9(1), 36–54.
- Kholilurrohman, K. (2024). *Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi*. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 60–80.
- Kim, Y., & Zhou, S. (2020). The effects of political conflict news frame on political polarization: A social identity approach. *International Journal of Communication*, 14, 22.
- Mansyur, I. C. (2023). *Polarisasi Politik di Indonesia 2014–2019: Sebuah Kajian Pustaka*. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22.
- Marlef, A., Pratiwi, I., & Masyhuri, M. (2024). *Kapita Selekta Psikologi Sosial: Menggali Akar Polarisasi Politik di Indonesia, Kekuatan atau Ancaman bagi Demokrasi Indonesia?*. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 152-162.
- M Iqbal Hakim, (2002). *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 11.,
- Peffley, M., Yair, O., & Hutchison, M. L. (2024). *Left-Right Social Identity and the Polarization of Political Tolerance*. *Political Research Quarterly*, 77(1), 30-44.
- Rahmadhani, A., et al. (2024). *Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu*. *IJEDR*, 3(1), 364–370.
- Rekker R 2021 The nature and origins of political polarization over science *Public Underst. Sci.* 30 352–368
- Rusmawan, U. (2019). *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Schweighofer, S. (2018). *Affective, Cognitive, and Social Identity Related Factors of Political Polarization* (Doctoral dissertation, ETH Zurich).
- Skoog, L., & Karlsson, D. (2022). *Perceptions of polarization among political representatives*. *Political Research Exchange*, 4(1), 2124923.
- Soenjoto, W. P. P. (2019). *Eksplorasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milenial Indonesia di era 4.0*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 209-226.
- Sörbom, A., & Jezierska, K. (2023). *Social Capital and Polarization: The Case of Polish Think Tanks*. *Journal of Civil Society*, 19(4), 347–365.
- Sugianto, S., Visman, V., & Darwin, D. (2023). *Politik Identitas terhadap Polarisasi Pemilu 2024*. *JISIP*, 12(2), 865–872.
- Surya, DA, Noerzamam, A., & Usni. (2021). *Politik identitas dibalik panggung pilkades*. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2)
- Turner-Zwinkels, FM, van Noord, J., Kesberg, R., García-Sánchez, E., Brandt, MJ, Kuppens, T., Easterbrook, MJ, Smets, L., Gorska, P., Marchlewska, M., & Turner-Zwinkels, T. (2025). *Polarisasi afektif dan sistem keyakinan politik: Peran identitas politik serta isi dan struktur keyakinan politik*. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 51 (2), 222–238.